

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinasti politik merupakan sistem dalam demokrasi yang menekankan pada proses pelanggaran atas kekuasaan pemerintahan yang berlangsung dengan memberikan ruang yang luas kepada satu entitas manusia yang memiliki hubungan darah maupun kekerabatan yang dekat. Dalam prosesnya, politik dinasti bertransformasi menjadi salah satu sistem yang banyak diterapkan dan diusahakan terlaksananya melalui agenda politik dalam negara demokrasi. Selain itu, dinasti politik juga memiliki peranan yang sangat krusial dalam peta politik di Indonesia. Ini dikarenakan dengan semakin kuatnya dominasi dinasti politik di sejumlah daerah, tentu memiliki dampak yang konstruktif bagi eskalasi dan pengamanan agenda partisipasi politik bagi kemenangan pemilihan umum di tingkat nasional.

Hal ini dapat ditinjau dari eksistensi politik oleh Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution yang mana merupakan anak dan menantu dari presiden Joko Widodo yang naik menjadi Walikota Surakarta dan Walikota Medan. Dengan naiknya kedua kerabat presiden tersebut, maka sudah dapat dikatakan bahwa dalam kepemimpinan presiden Joko Widodo telah terimplementasikan adanya indikasi dinasti politik. Selain itu, dalam cakupan legislatif pada periode tahun 2009 hingga tahun 2014, setidaknya terdapat 14 (empat belas) anggota dewan rakyat ditingkat pusat yang memiliki kekerabatan dengan berbagai kalangan keluarga birokrat. Variatifnya sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Kekerabatan Politik

No.	Keluarga Birokrat	Hubungan Kekerabatan	Posisi Legislatif	Parpol
1.	Presiden RI	Anak	Anggota DPR RI	Demokrat
2.	Mantan Presiden RI	Anak	Anggota DPR RI	PDIP
3.	Wapres RI	Anak	Anggota DPR RI	Golkar
4.	Gub. DIY	Istri	Anggota DPD RI	
5.	Mensos : Bachtiar Chamsyah	Anak	Anggota DPR RI	PPP
6.	Gub. Sulut	Anak	Anggota DPR RI	PDIP
7.	Gub. Sulsel : Syahrul Yasin Limpo	Anak	Anggota DPR RI	PAN
8.	Gub. Kaltim	Anak	Anggota DPR RI	PDIP
9.	Gub. Kalbar	Anak	Anggota DPR RI	
10.	Gub. Kalsel	Anak	Anggota DPD RI	PDIP
11.	Gub. Kalteng	Keponakan	Anggota DPR RI	Golar
12.	Gub. Sulsel	Anak	Anggota DPR RI	PAN
13.	Gub. Jambi	Istri	Anggota DPR RI	
14.	Gub. Lampung	Anak	Anggota DPD RI	Golkar
15.	Gub. Banten	Suami	Anggota DPR RI	
16.	Gub. Banten	Anak	Anggota DPD RI	

Sumber : *Kompas*, 2024

Dalam perjalanannya, banyak daerah yang terkontaminasi agenda politik dinasti melalui adanya proses rekrutmen yang melibatkan sanak keluarga dan kerabat, demi terlaksananya estafet kepemimpinan yang lebih lama. Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang mengalami proses dan implementasi politik dinasti yang bertahan hingga tahun 2019 dengan terpilihnya sang anak menjadi anggota DPD dan sanak kerabat lainnya (Effendi, 2018). Peta pembentukan politik dinasti di Provinsi Banten menurut Muhammad Al Fahjri Sukri (Sukri, 2020) telah dikonstruksikan oleh sang ayah yakni Chasan Sohib yang merupakan pengusaha lokal di Banten yang merupakan salah satu aktor

terbentuknya Provinsi Banten di masa dahulu. Secara teoritis, langkah yang ditempuh untuk membentuk kerajaan politik di Banten adalah mempergunakan logika aji mumpung dengan menempatkan Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten selama dua periode yang kemudian diikuti oleh anak, menantu, dan cucunya yang kemudian menjadi pejabat eksekutif maupun legislatif di pemerintahan lokal. Dinasti politik yang terjadi di Provinsi Banten pun terjadi atas dasar untuk memperkuat pengaruh kepemimpinan yang berlandaskan pada penguasa atau jawara dan ulama tradisional, bukan berdasarkan *populism dynasties* yang terjadi di beberapa daerah lainnya seperti Bantul dan Kendal.

Provinsi Maluku Utara, pula menjadi daerah yang memiliki permasalahan yang cukup kompleks mengenai dinasti politik. Dimana terjadi dua kelompok dinasti yang memiliki pengaruh yang cukup untuk mempengaruhi potensi kemenangan suatu bakal calon yang akan memasuki bakal calon Gubernur Provinsi Maluku Utara. Dua kelompok ini merupakan barisan kelompok Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus yang memiliki kesamaan yang sepadan dalam menaruh sanak keluarga dalam jabatan legislatif, baik di tingkat kota maupun provinsi (Dafrin Muksin, 2019). Praktik dinasti politik di legislatif keduanya sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Jabatan Dinasti Politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus

Keluarga	Nama/Hubungan Keluarga	Jabatan Politik
Kasuba	Abdul Gani Kasuba	Anggota DPD RI periode 2004-2007, Wakil Gubernur tahun 2009-2014 dan Gubernur dua periode 2014-2024
	Muhammad Kasuba/adik Abdul Gani Kasuba	Anggota DPRD Maluku periode 1999-2001, Anggota DPRD Maluku Utara dua periode 2001-2005, Bupati

		Halmahera Selatan dua periode 2005-2010
	Bahrain Kasuba/keponakan Abdul Gani Kasuba	Ketua DPRD periode 2009-20014, Anggota DPRD Provinsi periode 2014-2015 dan Bupati Halmahera Selatan periode 2016-2021
Mus	Ahmad Hidayat Mus	Ketua DPRD periode 2004-205 dan Bupati Kepulauan Sula dua periode 2005-2015
	Aliong Mus/adik Ahmad Hidayat Mus	Bupati DOB Kepulauan Taliabu sejak 2016-2021
	Zainal Mus/ adik Ahmad Hidayat Mus	Ketua DPRD Sula periode 2009-2014 dan Bupati Banggai Kepulauan Periode 2017-2022),
	Alien Mus/ adik Ahmad Hidayat Mus	Ketua DPRD Malut periode 2014-2019 dan Anggota DPD RI 2019-2024

Sumber : *Dafrin Muhsin, 2019*

Dalam kacamata politis, hadirnya politik dinasti di Provinsi Maluku Utara dapat ditinjau dari empat faktor yakni faktor ekonomi, politik, kultural dan sosial. Dalam faktor ekonomi, digambarkan bahwa Abdul Gani Kasuba yang mana merupakan Gubernur terpilih memiliki harta kekayaan mencapai Rp. 6.545.876.657,00 yang mana diantaranya berupa harta tanah dan bangunan sebesar Rp 5.380.000.000,00 alat transportasi dan mesin sebesar Rp 100.000.000,00 harta bergerak lainnya sebesar Rp.360.000.000,00 serta kas sebanyak Rp. 1.035.876.657,00 dan hutang senilai Rp 330.000.000,00. Namun, harta kekayaan yang dimiliki oleh Abdul Gani belum dapat menyaingi Ahmad Hidayat Mus yang memiliki permodalan yang lebih besar yakni Rp. 52.241.112.000,00. Kondisi ini mempengaruhi Abdul Gani dalam tahap selanjutnya memutuskan untuk menggandeng Ali Yasin yang memiliki harta kekayaan 4 kali lipat di atasnya untuk mengimbangi modal ekonomi yang dimiliki.

Kedua, faktor politik. Faktor politik Abdul Gani terbentuk ketika Muhammad Kasuba memegang jabatan sebagai anggota DPRD Maluku yang berlanjut hingga menjadi Bupati Halmahera Selatan selama dua periode. Dengan modal politik tersebut, Abdul Gani memulai perjalanan menjadi anggota DPD RI hingga saat ini menjabat sebagai Gubernur sampai tahun 2024. Ketiga, faktor sosial. Abdul Gani dikenal melalui keterlibatan aktifnya saat berkunjung di pengungsian dengan memberikan bentuk-bentuk ceramah sebagai usaha untuk menenangkan rohaniah pengungsi pada saat konflik yang berkecamuk di Maluku Utara. Selain itu, Abdul Gani Kasuba dikenal sebagai seorang Dai, bahkan kerap dijuluki sebagai “Dai seribu pulau” hal itulah yang membuat dirinya begitu akrab dan dikenal luas masyarakat Maluku Utara.

Terakhir, faktor kultural. Secara umum, terdapat 28 suku yang tersebar di 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku Utara dengan Suku Togale (Tobelo-Galela) dan Makayoa (Makian-Kayoa) merupakan suku mayoritas. Sebagai suku mayoritas, keduanya memiliki peran yang sangat menentukan kemenangan dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Maluku Utara. Abdul Gani Kasuba, sebagai lelaki kelahiran Tobelo, memiliki identitas kebudayaan sebagai masyarakat suku Togale (Tobelo-Galela) yang juga merupakan salah satu suku mayoritas di Maluku Utara. Hal itulah yang menjadi legitimasi yang kuat kemenangannya sebagai Gubernur.

Meninjau dari dua gambaran diatas mengenai dinasti politik, Kabupaten Indramayu memosisikan diri sebagai daerah yang mengimplementasikan konsep *Populisme Dynasties* yang merupakan suatu konsep dalam dinasti politik yang

terbentuk atas dasar Figur merakyat dan program populis, menjaga status quo, dibentuk secara *by incident*. Konsepsi ini menjadi suatu perputaran yang menegaskan kekuasaan yang panjang selama 20 tahun dengan menempatkan keluarga Irianto M. S. Syafiuddin atau lebih dikenal sebagai Yance sebagai penguasa tunggal. Perputaran politik yang berputat dalam satu keluarga ini, tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan kesuksesan Partai Golongan Karya (Golkar) dalam menancapkan pengaruhnya di Kabupaten Indramayu dengan mayoritasnya di kekuasaan legislatif.

Dalam periode kepemimpinan Yance yang bertahan selama 10 tahun, berhasil membangun prinsip-prinsip kekeluargaan yang biasa disebut klan dengan menempatkan tokoh-tokoh terdekat menjadi pucuk pimpinan dan anggota dalam pemerintahan (T.R, 2016, pp. 178-180). Selain itu, Yance juga mampu membangun konsolidasi kuat yang mengakar dalam tubuh partai dengan mengangkat tokoh-tokoh penting dalam partai sebagai anggota dalam organisasi pemerintahan dan membangun semangat solidaritas serta karismanya dalam menciptakan ruang kekeluargaan yang erat antar anggota dan pengurus partai secara berkesinambungan.

Dalam proses politiknya ini, Irianto M.S. Syafiuddin atau Yance telah dipastikan tidak dapat mencalonkan diri menjadi calon Bupati Kabupaten Indramayu periode tahun 2010 hingga 2015 karena terbentur oleh UU No.10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa dalam Pasal 162 dalam ayat 2 yang berbunyi "*Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5*

*(lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”*. Oleh karenanya, untuk meneruskan estafet kepemimpinan yang terus dilegitimasi, diperlukan membentuk dan memilih calon potensial untuk meneruskan pengaruh kepemimpinan yang telah dibentuk secara konsisten.

Ketokohan Yance yang begitu kuat dalam tubuh Partai Golkar dan masyarakat Kabupaten Indramayu pada umumnya, menjadi modal besar bagi sang Istri, Hj. Anna Sophanah untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai Bupati Kabupaten Indramayu untuk tahun kepemimpinan 2010 hingga 2015. Hasilnya, dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 1.335.036, sekitar 841.315 merupakan hak suara penuh yang sah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Indramayu tahun 2010, yang kemudian menempatkan pasangan Anna-Supendi sebagai urutan pertama dengan jumlah total suara mencapai 511.359 yang disusul oleh pasangan Gorry Sanury-Ruslandi dengan peroleh suara 11,33 persen dan Uryanto Hadi-Abas Abdul Jalil dengan peroleh suara 14,78 serta Api Karpi-Rawita dengan perolehan suara 5,36 persen, Mulyono Martono-Handaru dengan perolehan suara 2,10 persen, dan Toto Sucartono-Kasan Basari dengan perolehan suara 5,65 persen (Saefulloh, 2020).

Lebih lanjut, menurut Nanang Carsana (2020) menguraikan bahwa proses politik yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Indramayu telah dapat diprediksi memenangkan pasangan Hj. Anna Sophanah-Supendi mengingat kuatnya pengaruh sosok Yance. Kuatnya pengaruh ini, didasarkan pada loyalitas dan kepercayaan yang tinggi masyarakat Indramayu

kepada Yance. Selain itu, ada beberapa penyokong suara lainnya yang menjadi tumpuan bagi pasangan Hj. Anna Sophanah-Supendi untuk memenangkan kontestasi pemilihan didominasi oleh suara pemilih perempuan dengan menyumbang 673.220 suara.

Dalam periode selanjutnya, Hj. Anna Sophanah kembali mencalonkan diri menjadi Bupati Kabupaten Indramayu untuk periode 2015 hingga 2020 dengan menggandeng Wakil Bupati Indramayu sebelumnya yakni Supendi dengan koalisi partai yang meliputi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan terakhir adalah partai Nasional Demokrat (Nasdem) (Abdurahman, Maman, 2015).

Dalam keberjalanan kepemimpinan Hj. Anna Sophanah selama kurun waktu 8 tahun yang berlangsung antara tahun 2010 hingga 2018, perjalanan politik kekerabatnya telah memberi angin segar secara konsisten kepada suami dan anaknya. Untuk secara rincinya sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Kekerabatan Politik Hj. Anna Sophanah

No	Nama/Hubungan Keluarga	Jabatan Politik
1.	Irianto M.S. Syafiuddin	Wakil Ketua DPRD Jawa Barat tahun 2014-2019
2.	Daniel Muttaqien Syafiuddin	Anggota DPR RI tahun 2014-2019

Sumber : *Tirto.id*, 2021

Meninjau dari gambaran diatas, mengindikasikan adanya suatu fenomena dinasti politik yang akut dalam kepemimpinan Hj. Anna Sophanah. Selain itu, praktik dinasti yang terjadi juga melibatkan keterkaitan langsung dengan dinamika

yang terjadi di dalam tubuh Aparatur Sipil Negara atau ASN yang dalam pelaksanaannya, politik bagi-bagi jabatan menjadi kondisi yang dinikmati ramai-ramai oleh beberapa Aparatur Sipil Negara atau ASN yang memiliki tendensi secara langsung dengan suksesi kepala daerah yang baru. Hal ini menjadi suatu agenda yang cukup konsisten setiap tahunnya, sehingga muncul asumsi bahwa permasalahan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Indramayu dalam hal ini Aparatur Sipil Negara atau ASN masih menjadi alat yang dipolitisasi dan diintervensi untuk menaikkan popularitas pihak-pihak yang berkepentingan (Suhendar, Riva Rachmi Kusumah, 2020).

Menginjak tahun 2020, terjadi pergeseran arus dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Indramayu dengan ditandai meninggalnya Irianto M.S. Syafiuddin atau Yance yang merupakan aktor politik utama dalam mengontrol keterpilihan dinasti politik keluarga dalam mempertahankan eskalasi suara dan mobilisasi massa. Dampak nyata yang ditimbulkan adalah kegagalan Daniel Muttaqien Syafiuddin atau sering disapa Daniel dalam mempertahankan eksistensi suara dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Indramayu tahun 2020 dengan terpilihnya Nina Agustin Putri menjadi Bupati Kabupaten Indramayu periode 2021 sampai tahun 2026.

Berdasarkan uraian di atas penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian menyangkut penelitian yang berjudul **“Kebangkitan dan Kemunduran Dinasti Politik Irianto MS Syafiuddin di Kabupaten Indramayu 2000-2018”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat di latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses kebangkitan dinasti politik di Kabupaten Indramayu pada periode tahun 2000 hingga 2018?
2. Mengapa dinasti politik mengalami kemunduran di Kabupaten Indramayu pada tahun 2018 setelahnya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis bagaimana kebangkitan dinasti politik di Kabupaten Indramayu pada periode tahun 2000 hingga 2018.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemunduran dinasti politik di Kabupaten Indramayu.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai “Kebangkitan dan Kemunduran Dinasti Politik Irianto MS Syafiuddin di Kabupaten Indramayu 2000-2018” diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, baik secara akademis maupun praktis di bidang Politik dan Pemerintahan.

#### 1.4.1 Manfaat akademis

Bagi peneliti dan civitas akademik, penelitian ini merupakan proses belajar yang dilakukan untuk mempertajam daya kritis dalam melakukan penelitian mengenai bagaimana dinamika terbentuk dan kontinuitas dinasti politik berjalan dan menelisik faktor-faktor tumbangnya dinasti politik yang terjadi di Kabupaten Indramayu secara komprehensif. Lebih lanjut, penelitian ini menjadi manfaat sekaligus berguna untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis. Besar harapan penulis, penelitian ini dapat sumber literatur dan informasi penunjang bagi civitas akademik dalam penelitian-penelitian sejenis.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah sekaligus masyarakat Indramayu dan umum terkait bagaimana keberjalanan praktik dinasti politik di Kabupaten Indramayu. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meminimalkan fenomena ini terjadi kembali di masa yang akan datang. Lebih lanjut, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai salah satu prasyarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan.

### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang sedang ditulis oleh peneliti. Dalam penelitian terdahulu ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ramlan Darmansyah, Siti Desma Syahrani, dan Zulfa Harirah MS (2020), berjudul “*Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan potret dinasti politik yang terjadi di Provinsi Riau. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa lingkungan pemerintahan daerah di Provinsi Riau baik dari posisi Gubernur, Bupati hingga Walikota diisi oleh sanak keluarga yang meliputi anak, istri, kakak dan adik. Implikasi paling nyata dalam problematika dinasti politik yang ada di Provinsi Riau adalah tidak optimalnya tata kelola pemerintahan yang ada. Lebih lanjut, di tubuh pemerintahan Provinsi Riau pun terlihat dalam pengangkatan sang menantu untuk kemudian dijadikan sebagai Kepala Sub Bagian Retribusi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan juga istri sekretaris Daerah Riau yang diangkat sebagai Kepala Bidang Pengembangan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Serta kakak kandung Sekretaris Daerah Provinsi Riau dilantik sebagai Kepala Bidang Ops Satpol PP Riau (Nurita, 2020).

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Winda Roselina Effendi (2018), berjudul “*Dinasti Politik dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses terbentuknya dinasti politik lokal di Indonesia yang diruntut secara historis dengan menitikberatkan pada usaha penggambaran secara rigid mengenai proses-proses terbentuknya politik dinasti di Provinsi Banten dan relevansinya bagi

kemaslahatan demokrasi di Indonesia dalam hal ini khususnya lokal dalam mengoptimalkan proses politik yang berkeadilan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberjalanan dinasti politik yang dilakukan oleh elit-elit lokal yang berlangsung pada era tahun 2005 mengenai penyelenggaraan pemilukada pertama di Indonesia dan konsep otonomi daerah yang diimplementasikan pada tahun 2001. Dalam keberjalanannya, Ratu Atut Chosiyah membangun relasi dan hubungan politiknya dengan menjadi Gubernur Banten selama dua periode dan menempatkan anak, menantu, dan cucunya sebagai pejabat eksekutif maupun legislatif di tingkat lokal. Hal ini ditujukan untuk menjaga kehormatan sekaligus menjaga eksistensi pengaruh keluarga dalam peta politik yang ada di Provinsi Banten. Selain itu, eksistensi dinasti politik yang ada di Provinsi Banten sendiri tidak dapat dilepaskan secara langsung dengan keberadaan jawara dan ulama yang mengukuhkan keberadaan Ratu Atut dalam kharismatik dan simbolik dalam menopang dinasti politik Banten.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan Kartiwan dan Effendi Hasan (2022), berjudul “*Kejatuhan Politik di Kabupaten Aceh Tenggara (Studi Kasus Kekalahan Pasangan Ali Basrah – Denny Febrian Roza Pada Pilkada 2017)*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan gambaran mengenai dinasti politik yang dijalankan secara kontinu oleh keluarga Andy Soyfan Hasdam serta menentukan model dinasti politik yang diterapkan di Kota Bontang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menunjukkan bahwa faktor penyebab jatuhnya dinasti politik di Aceh Tenggara pada Pilkada tahun 2017,

antara lain: kejenuhan masyarakat terhadap pemerintahan H. Hassanudin, BMM, masyarakat menginginkan perubahan roda pemerintahan, isu mengenai Ali Basrah bukan putra daerah. Berdasarkan temuan tersebut terdapat 2 (dua) dampak negatif yang ditimbulkan akibat praktik politik dinasti yang dibangun di Aceh Tenggara yaitu terabaikannya hak-hak rakyat dan kaum intelektual di Aceh Tenggara dan hilangnya kebebasan hak memilih dan dipilih masyarakat.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Imroatun Nika (2022), berjudul *“Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik Melalui Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus Pencalonan Kepala Daerah di Solo 2020)”*. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pembentukan dinasti politik dalam pola rekrutmen partai politik terhadap proses pencalonan kepala daerah di Solo tahun 2020 dan untuk mengetahui model rekrutmen partai politik yang ideal dalam mencegah terbentuknya dinasti politik di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam proses penjaringan dan pencalonan bakal calon Walikota Solo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menemui permasalahan politis yang mana hal ini merujuk pada deklarasi oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Kota Solo yang menyatakan setuju untuk mendukung Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Solo di Pilkada tahun 2020 yang dinilai secara etika partai telah memenuhi dan memiliki kinerja yang optimal dalam proses kaderisasi partai. Namun hal ini kemudian digeser oleh eksistensi Gibran Rakabuming Raka yang

mencalonkan diri melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jawa Tengah dan pada akhirnya, Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa harus sepakat dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai pengganti mereka dalam pencalonan Walikota Solo di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020. Kondisi ini memicu problematika yakni, adanya anggapan bahwa proses rekrutmen politik yang dilakukan cenderung kurang baik yang didasarkan pada proses tarik ulur dalam penentuan calon dan proses pencalonan dan pengusung Gibran Rakabuming Raka diindikasikan sebagai proses pembentukan dinasti politik karena keterkaitannya dalam hubungan ayah dan anak dengan Presiden Joko Widodo. Selain itu, terdapat beberapa model rekrutmen calon yang idealnya dapat diterapkan oleh partai yakni model partisan, model *compartmentalization*, model *immediate survival*, dan model *civil service reform* (Putra, 2003).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Pahrudin (2018), berjudul “*Dinasti Politik Pemerintahan Desa di Kabupaten Polewali Mandar*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendukung bertahannya dinasti politik yang dilakukan oleh dinasti *Patjiddai* dalam jabatan Kepala Desa dalam pemerintahan Desa Katumbangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dominasi politik dinasti *patjiddai* di Desa *Katumbangan* dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, *historis* kepemimpinan dan hubungan patron-klien dinasti *patjiddai* dengan masyarakat Desa Katumbangan. Pertama, *historis* kepemimpinan. Dalam keberjalanan keluarga *patjiddai* memimpin Desa Katumbangan memiliki rekam jejak politik

yang baik, hal ini dapat dilihat dari keberpihakan dinasti *patjiddai* dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat secara intens. Kondisi ini menjadikan dinasti *patjiddai* dipandang sebagai model kepemimpinan yang ideal untuk memimpin Desa Katumbangan. Kedua, hubungan patron-klien dinasti *patjiddai* dengan masyarakat Desa Katumbangan. Hubungan ini terbentuk karena masyarakat Desa Katumbangan sebagian besar menempati tanah dengan status pinjaman dan bekerja di atas tanah milik keluarga *patjiddai*. Kondisi ini menjadi faktor kedua yang menjadikan dinasti *patjiddai* dapat secara kontinu dalam memimpin Desa Katumbangan karena masyarakat yang memiliki kondisi di atas, menjadi klien oleh keluarga *patjiddai* dalam memenangkan setiap kontestasi Pilkada Desa Katumbangan.

Berangkat dari lima penelitian di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti yakni berkaitan erat dengan denah lokasi penelitian dan model serta praktik yang diaplikasikan. Berkaitan dengan denah lokasi penelitian yang dilakukan, penulis mencoba untuk membandingkan kondisi peta politik Kabupaten Indramayu dengan daerah lainnya. Perbedaan peta politik dan budaya politik menjadi hal yang sering ditemui oleh peneliti. Lebih lanjut, baik dari segi model maupun praktik yang dijalankan oleh dinasti politik di beberapa penelitian juga menunjukkan hal yang berbeda. Yang mana secara rigid, Kabupaten Indramayu mengaplikasikan model praktik dinasti yang mengakar kuat, tidak hanya menempatkan beberapa orang yang masih dalam satu hubungan kekerabatan dalam dinas-dinas terkait namun juga menyebarkan semangatnya dalam perpolitikan nasional dan memperkuat

posisi dalam partai dengan mengangkat orang-orang terdekat. Lebih lanjut, penelitian ini juga ingin melihat proses kaderisasi politik yang dilakukan oleh partai oposisi dalam hal ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang berhasil menjadi penyeimbang sekaligus menumbangkan dinasti politik di Kabupaten Indramayu.

## **1.6 Kerangka Teori**

### **1.6.1 Dinasti Politik**

Menurut Martien Herna (Susanti, 2017), dinasti politik dan politik dinasti adalah dua hal yang berbeda. Dinasti politik didefinisikan sebagai suatu sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Sedangkan politik dinasti, proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu yang meliputi keluarga elite dengan bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan.

Secara sederhana, dinasti politik merupakan suatu proses pelembagaan dalam kekuasaan yang berlandaskan pada kekeluargaan serta memiliki konsekuensi pada perwujudan kondisi demokrasi yang cenderung buruk karena masyarakat belum optimal dalam memanfaatkan hak suara dalam pemilihan. Ini karena pada hakikatnya, proses demokratisasi dijalankan dengan adanya agenda pemilihan secara langsung oleh rakyat. Dalam membangun dinasti politik yang kuat dan *sustainable*, diperlukan penegasan mengenai sumber-sumber kekuatan yang wajib dimiliki. Kekuatan-kekuatan yang dimaksud yakni berupa modal finansial, kekuatan jaringan, dan posisi atau kedudukan dalam partai (Hidayati,

2014). Dengan kokohnya ketiga kekuasaan ini, akan secara agresif menekan aktor lain yang ingin membangun kedudukan politik dalam kekuasaan pemerintahan. Hal ini juga diperkuat dengan ketiadaan regulasi yang mengatur secara konkret mengenai pembatasan hak politik kekerabatan dalam mencalonkan diri dalam kontestasi politik, baik dalam agenda Pilkada, Pemilu hingga pemilihan legislatif. Dengan ketiadaan regulasi yang bersifat memitigasi praktek politik kekerabatan ini menjadi salah satu alasan mengapa terjadi eskalasi pertumbuhan tren politik kekerabatan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 (Rahmatunnisa, 2021).

Menurut Adelia Fitri (2019), dinasti politik dipahami sebagai wujud kontrol kekuasaan pada pemerintahan di tingkat lokal. Lebih lanjut, secara tradisional, dinasti politik dipahami sebagai kondisi dimana penguasa berupaya meletakkan keluarga, saudara, dan kerabatnya pada jabatan-jabatan strategis dengan tujuan untuk membangun suatu kerajaan politik di dalam pemerintahan. Oleh karenanya, gerakan mobilisasi politik dengan prinsip kekeluargaan yang meletakkan orang-orang terdekat berada dalam kedudukan strategis dapat diartikan tindakan yang menyimpang dari prinsip-prinsip etika dan partisipasi politik secara umum. Dalam konteks kepemimpinan, eksistensi praktik dinasti politik menurut Marcus Mietzner (dalam Alim Bathoro, 2011) merupakan suatu tindakan yang dalam memaknai pemerintahan dalam scope atau lingkup yang mengerucut kepada bentuk-bentuk penyimpangan dalam sistem demokrasi dengan realitas yang paling nampak adalah demokrasi mengenai degradasi kepemimpinan dan semakin tidak sehat dalam mewujudkan cita-cita luhur demokrasi seutuhnya.

Asas dasar dalam pembentukan dinasti politik adalah keterkaitan yang menyangkut mengenai hubungan pertalian sedarah dengan mekanisme perkawinan yang sah. Dengan adanya mekanisme keterkaitan melalui perkawinan ini menjadi media yang memudahkan pelbagai aktor kekerabatan untuk melakukan manuver politik yang ditujukan untuk meraih sekaligus mempertahankan kedudukan politis yang telah dicapai oleh pengalaman keluarga terdahulu. Sehingga, aktor baru ini akan memperoleh aksesibilitas yang relatif lebih mudah karena ketersediaan sistem yang menghendaki pemulusan politis, dalam hal ini adalah mekanisme turun temurun jabatan (Windi, Rajiv, 2017). Kondisi ini tentu akan berdampak secara luas kepada seluruh komponen pemerintahan yang ada, karena akan sangat rentan bagi aktor dinasti untuk membagikan jabatan politis kepada rekan dan kerabat terdekat dengan pendekatan yang terbatas pada balas budi, bukan lagi pada realitas kualitas. Ini tentu menimbulkan dampak lainnya yakni peran aktor dinasti politik berdampak pada pengalokasian kepentingan-kepentingan yang berdasarkan pada keluarga dan pribadi, sehingga ini melanggar asas penyelenggaraan kepentingan umum (Azhar, Muhamad, 2015). Lebih lanjut, eksistensi aktor dinasti politik dalam kepemimpinan pemerintahan juga akan menghambat terlaksananya pelbagai agenda karena keterbatasan dalam memaknai problematika non-politis yang seringkali berkaitan dengan kinerja pejabat “keluarga” dalam implementasi di lapangan.

Menurut Ramlan Darmansyah dkk (2020), eksistensi otonomi daerah dalam wujud desentralisasi merupakan suatu upaya konkret yang dilakukan oleh

pemerintah untuk memajukan demokrasi dalam arti mendekatkan pemerintah lokal dengan masyarakat yang diharapkan dapat menjadi wahana untuk menyediakan ruang yang lebih luas untuk mendorong peran partisipasi masyarakat dalam proses politik serta pengembangan daerah lainnya seperti kebijakan dan *controlling* pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Namun, cita-cita ini kandas dengan lahirnya raja-raja kecil di tingkat lokal yang melakukan praktik dinasti politik dengan diiringi oleh perilaku menyimpang. Praktik-praktik menyimpang yang merupakan dampak dari eksistensi politik dinasti adalah tumbuh suburnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta berdampak secara luas bagi masyarakat yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah.

Menurut Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KKPPOD), eksistensi dinasti politik memiliki beberapa model. Pertama, model arisan. Model ini merujuk pada kekuasaan yang menggumpal dalam satu keluarga yang berjalan secara turun temurun atau regenerasi kepemimpinan. Kedua, dinasti politik lintas kamar dengan cabang kekuasaan. Model kedua ini merujuk pada eksistensi dinasti politik yang terjadi dengan mekanisme yang menunjukkan si A sang ayah merupakan bupati kabupaten A dan si B sang anak merupakan anggota DPRD Kabupaten B. Ketiga, model lintas daerah. Model ini menitikberatkan pada peran dan posisi strategis yang dimiliki oleh satu keluarga dalam mengontrol eksistensi pemerintahan antar daerah, misalnya si A merupakan Bupati Kabupaten A dan si B merupakan Bupati Kabupaten B dengan masih satu garis kekeluargaan (Didik Gunawan Suharto *dkk*, 2017). Dalam model dinasti politik yang ada,

relevansi dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Indramayu adalah model dinasti politik lintas kamar dengan cabang kekuasaan. Ini dikarenakan pada saat sang ibu menjabat yakni Hj. Anna Sophanah tengah menjabat sebagai bupati kabupaten Indramayu dan sang anak yakni Daniel Muttaqien Syafiuddin mendapatkan mandat dari rakyat sebagai perwakilan di Senayan dalam hal ini adalah anggota DPR RI.

Dalam usaha untuk membangun dinasti politik yang mapan, kharisma orang yang pertama kali memimpin merupakan sesuatu yang esensial bagi keberjalanan politik selanjutnya. Hal ini dikarenakan kuatnya pengaruh yang ditancapkan sebelumnya memiliki dampak pada dorongan eskalasi kepercayaan masyarakat kepada turunannya, ini karena dianggap mewarisi potensi yang dimiliki oleh sang ayah atau aktor politik dinasti pertama (Desiana, *dkk*, 2013). Fenomena ini terimplementasikan dalam beberapa studi kasus, misalnya dinasti politik di Banten yang dibangun oleh Chasan Sohib untuk kemudian diwariskan kepada Ratu Atut sebagai Wakil Gubernur Provinsi Banten. Chasan Sohib merupakan ketua dari Satuan Karya yang merupakan penopang Partai Golongan Karya (Golkar) dalam mengontrol eksistensi suara dan keterpilihan. Akses ini menjadi celah bagi Chasan Sohib dalam melebarkan pengaruh sekaligus jaringan bisnis sehingga pada tahap selanjutnya berkembang pesat dan menjadi katalis baginya untuk melakukan penguasaan lokal atas politik Banten dengan menempatkan Ratu Atut sebagai Wakil Gubernur Banten.

### 1.6.2 Teori Kekuasaan

Menurut Max Weber (dalam Kartini Kartono, 1996), kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Oleh karenanya, kekuasaan dapat diartikan lebih kompleks sebagai bentuk pemaksaan kehendak dari orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan yang ada.

Michel Foucault ( dalam umar kamahi, 2017) kekuasaan diartikan sebagai suatu istilah yang merujuk pada situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Foucault memandang kekuasaan merupakan sesuatu yang bersifat bergerak dan tersebar dimana-mana serta tanpa disadari oleh objek kekuasaan tersebut. Cronin (1996) juga menggambarkan secara konkret mengenai kekuasaan yang dipandang secara substantif atau tertanam dalam, dijalankan oleh, dan terhadap subjek menjadi konsep kekuasaan relasional sebagai suatu fungsi jaringan relasi antar subjek.

Lebih lanjut, mengenai kekuasaan, pandangan pertama yang ditujukan untuk mendefinisikan kekuasaan ialah dideskripsikan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk mengontrol yang lain, abai terhadap fungsi kekuasaan yang nyata pada masyarakat modern. Dimana, kekuasaan dalam konteks ini dimaknai sebagai yang menghubungkan kekuasaan dengan kedaulatan (*sovereignty*) dan hukum ( Mudhoffir, Abdil Mughis, 2014). Meninjau dari

gambaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi kekuasaan merupakan otoritas yang dimiliki oleh individual, kelompok, organisasi serta entitas lembaga yang berpengaruh terhadap entitas yang dipimpin.

### **1.6.3 Teori Kepemimpinan**

Menurut Encep Syarifudin (2004), kepemimpinan didefinisikan sebagai proses untuk mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Oleh karenanya, kepemimpinan dapat diasumsikan sebagai suatu perangkat atau alat yang dipergunakan untuk mengukur dan mengatur eksistensi keberjalanan suatu organisasi atau lembaga yang dipimpin.

Kepemimpinan sendiri merupakan salah satu dimensi kompetensi yang sangat menentukan kinerja atau keberhasilan suatu organisasi atau lembaga untuk bergerak sinergis dalam usaha memajukan serta mengembangkan iklim yang baik. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Armstrong (2003) yang menggambarkan kepemimpinan sebagai proses memberi inspirasi kepada semua individu yang dipimpin agar dapat melakukan kinerja yang baik untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Kepemimpinan menurut DuBrin (2005:3) adalah suatu upaya yang diusahakan untuk mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan, cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah, tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak atau merespons dan menimbulkan perubahan positif, kekuatan dinamis penting yang memotivasi dan

mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan, kemampuan untuk menciptakan rasa percaya diri dan dukungan diantara bawahan agar tujuan organisasional dapat tercapai (Brahmasari & Suprayetno, 2008).

### **1.6.3.1 Tipe Kepemimpinan**

Siagian (2003) menyatakan bahwa terdapat lima tipe kepemimpinan yang mempunyai ciri masing-masing, yakni:

#### **a. Tipe Otokratik**

Merupakan tipe kepemimpinan yang memiliki ciri-ciri yang pada umumnya bersifat negatif. Ciri-ciri yang dimaksud berupa memiliki sifat egois yang besar sehingga sulit menerima kenyataan dan kebenaran sehingga segala sesuatu yang utamanya adalah keputusan yang bersifat strategis bersifat subjektif.

#### **b. Tipe Paternalistik**

Merupakan tipe kepemimpinan yang mempunyai ciri sebagai berikut:

1. Bersikap selalu melindungi.
2. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri.
3. Tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif dan mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka sendiri.
4. Sering menonjolkan sikap paling mengetahui.
5. Melakukan pengawasan yang ketat.

c. Tipe Kharismatik

Merupakan tipe kepemimpinan yang memiliki kekuatan, energy, daya tarik dan wibawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain itu bersedia untuk mengikutinya tanpa selalu bisa menjelaskan apa penyebab kesediaan itu. Oleh karenanya, tipe kepemimpinan ini dapat dikatakan memiliki kekuatan yang cukup memiliki kekuatan untuk memimpin jalannya kepemimpinan secara kontinu selama proses kepemimpinan yang dijalankan mengoptimalkan kharismatik yang telah ditanamkan sejak keterpilihannya menjadi pemimpin.

d. Tipe Laissez Faire

Merupakan tipe kepemimpinan yang berfokus dan konsen pada pelimpahan wewenang yang berasal dari pimpinan kepada bawahannya dengan motif kepada kondisi situasional yang mengisyaratkan pada pengambilan keputusan didasarkan oleh bawahannya dan keberadaan budaya dalam organisasi lebih bersifat suportif.

e. Tipe Demokratik

Merupakan tipe kepemimpinan yang berfokus pada pendelegasian wewenang yang bersifat praktis dan realistik tanpa kehilangan kendali atas organisasi dan selalu melibatkan bawahan atau anggota yang dipimpin untuk secara aktif menentukan arah kebijakan dan keputusan. Biasanya, pemimpin jenis ini relatif lebih dihormati dan disegani karena perilakunya dalam kehidupan

organisasional yang mendorong para bawahannya menumbuhkan dan mengembangkan daya inovasi dan kreativitasnya.

#### **1.6.4 Teori Local Bossim**

Tokoh dalam teori local bossim menjelaskan bahwa adanya *strong state* dibandingkan *state society*. Bossim menunjukkan perannya sebagai elit lokal yang memiliki kontrol terhadap kekuatan *koersif* dan sumber daya ekonomi dalam wilayah teritorial yang dikuasainya. Bossim menjalankan polanya dalam rezim daerah yang bercirikan adanya persekutuan dari birokrat, pemimpin partai, pengusaha, militer dan para preman . Sidel mengatakan, bahwa untuk menunjukkan eksistensinya dalam pemerintahan lokal berbagai strategi dilakukan *bossisme* lokal untuk mempertahankan dominasi dalam sektor ekonomi dan politik. Strategi-strateginya antara lain (Sidel, 1998) :

1. Menempatkan kerabat dan kroni sebagai Walikota, Wakil Walikota dan anggota Legislatif Daerah;
2. Membentuk mesin politik sebagai broker suara;
3. Mengatur penempatan Pejabat Daerah;
4. Mengatur proyek pemerintah dan dana aspirasi;
5. Mengatur Peraturan Daerah (Perda);
6. Mengatur keringanan pajak;
7. Mengatur pinjaman dari Bank Pembangunan Daerah (BPD);
8. Memberikan konsesi dan kontrak pertambangan, kehutanan dan perkebunan;
9. Intimidasi dan kekerasan politik;
10. Menerapkan kebijakan tangan besi untuk mengatasi konflik tanah dan melemahkan serikat buruh.

Sidel melihat perkembangan *bossim* di Indonesia terjadi seiring dengan melemahnya kontrol pusat terhadap daerah, kebijakan desentralisasi telah mengakhiri kontrol efektif pusat yang mencegah pejabat-pejabat sipil dan perwira-perwira menengah militer untuk membangun wilayah kekuasaan lokal tersendiri. Kondisi tersebutlah yang telah memberi ruang yang sangat leluasa bagi para politikus untuk memperoleh dan mengakumulasi kekuasaan dan kekayaan.

### 1.7 Operasional Konsep

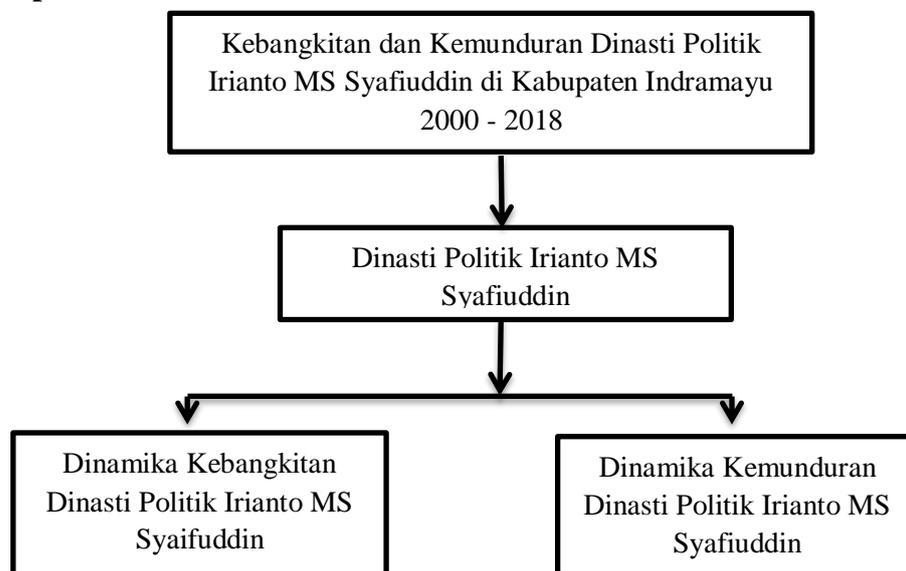
Tabel 1. 4 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Definisi	Indikator
Dinasti Politik	Dinasti merupakan istilah yang merujuk pada tatanan pemerintahan yang dipimpin oleh satu garis keturunan yang sama yakni satu keluarga. Sementara politik merupakan istilah yang menjabarkan mengenai cara dan sistem pemerintahan berjalan dan didapatkan. Oleh karenanya, dinasti politik merupakan istilah yang bermakna penguasaan atas kekuasaan politik yang didasarkan pada kapasitas kekuatan satu keluarga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nepotisme Kekuasaan.</li> <li>- Jaringan Kekuasaan yang Terorganisir.</li> <li>- Mobilisasi dan Militansi Massa Pendukung.</li> <li>- Penerapan Kebijakan Populis.</li> <li>- Pewarisan Biologis Kekuasaan.</li> </ul>
<i>Local Bossim</i>	<i>Local Bossim</i> merupakan istilah yang digunakan untuk memaknai kontrol dominan yang dimiliki oleh individu secara strategis dalam memainkan kekuatan <i>koersif</i> dan sumber daya ekonomi disuatu wilayah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menempatkan anak dan kerabat di Lembaga Legislatif.</li> <li>- Menempatkan kroni sebagai Pejabat Daerah.</li> <li>- Mengorganisir Organisasi Massa sebagai Mobilisasi Massa dan Suara.</li> <li>- Mengatur dana aspirasi anggota.</li> </ul>
Kepemimpinan	Kepemimpinan merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemimpin dalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengedepankan Program dan Kebijakan Populis.</li> </ul>

	<p>mengimplementasikan agenda pembangunan berdasarkan dengan pendekatan yang dibentuk berdasarkan pada karakteristik individu pemimpin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun Kedekatan dengan Rakyat.</li> <li>- Kemampuan Memahami Kebutuhan dan Karakteristik Rakyat.</li> <li>- Memiliki Kepekaan dan Menghargai Pendapat.</li> <li>- LAKIP</li> </ul>
--	---	---

Sumber: *Diolah oleh penulis*

### 1.8 Alur Berpikir



### 1.9 Metodologi Penelitian

#### 1.9.1 Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Merujuk pada pendapat Creswell (2016) menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah berupa dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi data. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu

penelitian yang mengarah pada studi kasus, fakta ataupun kejadian secara akurat dan sistematis terkait dengan daerah tertentu.

Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif digunakan karena dapat melihat dan memaknai suatu konsep dalam konteks dan kondisi apa adanya serta dapat menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai permasalahan yang akan diangkat peneliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan mengenai keberjalanan dari eksistensi dinasti politik di Kabupaten Indramayu dalam hal ini adalah untuk mengidentifikasi model praktik dinasti politik yang diterapkan pada rentang kepemimpinan tahun 2000 hingga 2018 dan menganalisis faktor-faktor tumbangnya dinasti politik Irianto MS Syafiuddin di Kabupaten Indramayu yang telah bertahan selama delapan belas tahun.

### **1.9.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu pengurus dan anggota Partai Golongan Karya (Golkar), pengurus serta masyarakat Indramayu yang berada di Kabupaten Indramayu Barat yang memiliki peran penting sebagai informan dalam memperoleh data terkait dengan penelitian ini dan masyarakat selaku pelaksana kebijakan. Penentuan informan menggunakan *purposive sampling*, yaitu memilih kelompok subjek atau sifat atau ciri tertentu yang memiliki kaitan dengan penelitian Berikut informan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Anak Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin sekaligus Anggota DPR RI periode tahun 2014-2019, Pak Daniel Mutaqien Syafiuddin S.T.

- b) Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode tahun 2019-2024, pak Hilal Himawan S.I.P., M.I.P.
- c) Ketua Pengurus Harian DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Pak Wawang.
- d) Ketua DPD KNPI Kabupaten Indramayu, Pak Yoga.
- e) Mantan Direktur Umum PDAM Kabupaten Indramayu, Pak Tatang.
- f) Anggota Pembina Yayasan Universitas Wiralodra, Pak Suhaeli Nawawi.
- g) Mantan Camat Gabuswetan, Pak Mulyono Martono.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksistensi dinasti politik yang ada di Kabupaten Indramayu pada tahun 2000 hingga 2018. Dinasti Politik di kabupaten Indramayu dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki dampak yang luas bagi keberjalanan dan relevansinya bagi eksistensi dinasti politik di wilayah lokal lainnya.

### **1.9.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

#### **a) Data Primer**

Menurut Hasan (2002) data primer merupakan data yang didapatkan atau diperoleh langsung di lapangan dengan melakukan penelitian. Sumber data primer tersebut dapat berupa individu atau perseorangan seperti peneliti melakukan wawancara. Data primer antara lain data mengenai informan atau narasumber, hasil observasi peneliti di lapangan dan adanya notulensi hasil wawancara. Merujuk kepada definisi tersebut bahwa dapat dipahami data primer merupakan data yang bersumber dari informan secara langsung yang dapat memberikan data kepada pengumpul data biasanya dilakukan dengan adanya proses wawancara dengan informan tanpa adanya pihak lain atau perantara.

## **b) Data Sekunder**

Menurut Hasan (2002) data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan atau diperoleh dari penelitian terdahulu, literatur, buku dan lain sebagainya yang memang sudah tersedia berbagai sumber-sumbernya serta sifatnya yaitu untuk menguatkan data primer. Merujuk kepada definisi tersebut dapat dipahami bahwa sumber data sekunder ini didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung, peneliti biasanya menggunakan penelitian atau karya tulis terdahulu yang memang masih relevan dengan penelitian yang akan diteliti

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan peneliti yaitu berupa buku dan jurnal-jurnal penelitian yang masih terkait dengan praktik-praktik dinasti politik serta artikel atau data yang diunggah di situs atau *website* di internet.

### **1.9.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari :

#### **a) Wawancara**

Menurut Kerlinger (1992) wawancara merupakan peran situasi tatap muka interpersonal dimana adanya proses komunikasi yang bersifat interaksional antara dua pihak yang mana salah satu pihak memiliki tujuan dengan mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan suatu jawaban sesuai dengan topik penelitian yang akan diteliti. Dapat dipahami wawancara ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat menjawab persoalan atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pada penelitian ini wawancara

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk mengidentifikasi model praktik dinasti politik yang diterapkan pada rentang kepemimpinan tahun 2015 hingga 2020 dan menganalisis faktor-faktor tumbangnya dinasti politik di Kabupaten Indramayu yang telah bertahan selama dua puluhan tahun.

b) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) merupakan sebuah catatan atau historis dari berbagai peristiwa yang telah terjadi atau berlalu biasanya berupa tulisan, gambar atau sebuah karya monumental dan lain-lain. Melalui definisi diatas dapat dipahami bahwa dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang sebelumnya sudah ada dan peneliti harus cermat dalam memilih beberapa data yang memang dianggap masih relevan dengan penelitian yang akan diteliti.

### **1.9.5 Validasi Data**

Data yang telah diperoleh perlu untuk diuji keabsahannya agar dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dilakukan melalui teknik triangulasi. Triangulasi dalam perisetan dapat ditujukan untuk menguji daya dapat dipercaya yang berarti data diperiksa dan dicek dari berbagai sumber data dengan cara yang beragam, dan waktu yang berbeda (Margono, 2010). Teknik triangulasi yang digunakan pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan teknik triangulasi yang mempertajam data dengan cara mengecek data yang diperoleh selama perisetan melalui beberapa sumber atau informan (Sugiyono, 2017, 2016).

### **1.9.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif. Untuk menganalisis data terutama data yang bersifat kualitatif bukanlah suatu hal yang mudah karena dalam penelitian kualitatif biasanya terdapat data yang bersifat tidak terstruktur, dimana untuk menganalisis data yang tidak terstruktur tersebutlah dibutuhkan sebuah metode dan cara tersendiri dan juga untuk menganalisis data kualitatif ini biasanya tidak terlepas dari subjektivitas peneliti (C.Marshall & Rossman, 2006).

Secara umum proses penelitian dengan data yang diperoleh secara kualitatif memiliki keunggulan daripada data yang diperoleh secara kuantitatif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) . Dari sini dapat dipahami bahwa analisis data pada penelitian kualitatif ini dilakukan dengan tujuan memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Selain itu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dapat lebih fokus kepada suatu objek fenomena sesuai dilapangan, karena tidak mengalami dampak data angka yang sudah direduksi seperti dalam penelitian kuantitatif. Melalui penelitian kualitatif pula data yang didapat diharapkan dapat bersifat kompleks dalam memandang sebuah fenomena dan berbagai sudut pandang ketika dilapangan.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan model analisis interaktif data yang dirumuskan oleh Miles dan Huberman (1984) yang meliputi tiga hal yaitu:

#### **a) Reduksi Data**

Reduksi data merupakan tahapan dari teknik analisis data yang dilakukan dengan memilah, menyederhanakan, serta memfokuskan data yang diperoleh di

lapangan pada hal-hal yang penting. Pada proses reduksi data inilah data disederhanakan serta mentransformasikan data kualitatif ke dalam berbagai catatan melalui seleksi yang ketat. Dalam penelitian ini peneliti mereduksi data yang sudah didapat melalui teknik pengumpulan data baik data primer dari hasil observasi dan wawancara, serta data sekunder dari hasil dokumentasi. Dengan kata lain adanya proses reduksi data ini digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan sesuatu agar lebih terarah dan membuang yang dianggap tidak penting, sehingga nantinya data yang dihasilkan lebih mudah untuk ditarik kesimpulan.

#### **b) Penyajian Data**

Penyajian data yang dimaksud yaitu kumpulan informasi dapat berupa gambar, tulisan ataupun tabel dan grafik dengan tujuan untuk menyelaraskan informasi sehingga dapat relevan dengan kondisi yang diteliti dan juga agar memudahkan peneliti dalam penguasaan informasi dari hasil penelitian.

#### **c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Tahap terakhir dari analisis data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses dari sebuah penelitian masih dilaksanakan hal tersebut serupa dengan proses reduksi data. Setelah data yang sudah terkumpul dan dirasa cukup memadai maka diambil kesimpulan sementara, tentu hal tersebut harus didukung oleh data-data atau bukti yang valid. Kesimpulan ini merupakan inti atau pokok bahasan dari temuan penelitian yang telah dilakukan, yang mana biasanya disertai pendapat peneliti. Penarikan kesimpulan harus sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.